



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATNA LUHUNG TJIPTANINGTYAS
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
3. NHK : 214748

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.595.000.000

1. Tanah Seluas 1520 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
2. Tanah Seluas 492 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/45 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 568.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO MIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 230.000.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 148.291.825

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.541.291.825



III. HUTANG

Rp. 58.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.483.291.825

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.